

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Instruksi Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BKPM menyusun laporan pertanggung jawaban kinerja dalam bentuk “Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2010”.

Laporan akuntabilitas kinerja ini, menguraikan hal-hal pokok berkaitan dengan pelaksanaan tugas, fungsi, peran dan kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal selama tahun 2010, serta penjelasan mengenai pencapaian tujuan dan sasaran strategis BKPM sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Strategik (Renstra) BKPM Tahun 2010-2014.

Sasaran strategis yang ditetapkan di dalam Renstra BKPM tersebut di atas, **seluruhnya telah dapat dicapai dengan baik**, melalui berbagai kebijakan, strategi dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja dilingkungan BKPM.

Secara umum dapat disampaikan bahwa capaian realisasi investasi yang merupakan *outcome (goal)* BKPM dalam rangka kontribusi bagi peningkatan perekonomian nasional, meningkat sangat signifikan baik dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan di dalam Renstra maupun bila dibandingkan dengan realisasi investasi tahun 2009.

Namun demikian, mengingat target realisasi investasi yang ditetapkan oleh Kepala BKPM tahun 2011, meningkat 15% dari realisasi investasi tahun 2010, yaitu dari realisasi investasi sebesar Rp 208,5 triliun tahun 2010, menjadi Rp 240 triliun tahun 2011, maka masih diperlukan berbagai upaya yang harus dilakukan dalam tahun 2011, baik yang menyangkut penyempurnaan kebijakan yang terkait investasi, perbaikan pelayanan investasi, pemberian berbagai tambahan fasilitas fiskal bagi kegiatan penanaman modal, percepatan pembangunan berbagai infrastruktur, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, agar target tersebut dapat tercapai.

Disamping itu, masih diperlukan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan promosi penanaman modal baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam rangka menyebarkan informasi potensi investasi Indonesia dan iklim

investasi yang kondusif, sehingga menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Demikian, semoga laporan akuntabilitas kinerja ini dapat memberikan manfaat.

Jakarta, 31 Januari 2011
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Kepala,



Ikhtisar Eksekutif

Pemerintah menetapkan prioritas nasional di bidang penanaman modal yaitu *"menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan meningkatnya realisasi penanaman modal di seluruh wilayah Indonesia"*.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan berbagai penataan dan penyempurnaan berbagai kebijakan sektor terkait, perkuatan koordinasi antar pengambil keputusan sampai kepada perbaikan prosedur perizinan yang keseluruhannya dalam rangka mewujudkan kepastian hukum serta memudahkan pelayanan kepada para penanam modal.

Selain itu, dilakukan juga kajian yang terus-menerus terhadap pengembangan insentif penanaman modal yang tujuannya adalah untuk memperkuat daya saing investasi di berbagai sektor, dan yang tidak kalah pentingnya adalah perbaikan infrastruktur penunjang bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif yang mampu membangun kekuatan struktur perekonomian nasional. Kecenderungan arus investasi dunia saat ini hanya akan mengalir ke negara maupun daerah yang menjanjikan prospek keuntungan, menawarkan kemudahan dan pelayanan yang lebih baik.

Kondisi iklim investasi Indonesia sepanjang tahun 2010 telah menunjukkan perbaikan, hal ini tercermin dari hasil survey World Economic Forum (2010 – 2011) tentang perbandingan daya saing global yang menempatkan Indonesia di peringkat 44, lebih baik 10 tingkat dari peringkat Indonesia di tahun 2009-2010 yang menempati peringkat 54 dari 133 negara di dunia.

Terdapat sekitar 100 indikator yang digunakan dalam survei tersebut, yang direfleksikan dalam 12 pilar utama daya saing, salah satunya adalah pilar efisiensi berbisnis disamping pilar utama lainnya yaitu: **institusi, infrastruktur, stabilitas makroekonomi, kesehatan dan pendidikan utama, pendidikan tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, ukuran pasar, dan inovasi.**

Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif seperti yang dijelaskan sebelumnya dan berdasarkan amanat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, BKPM telah menyusun suatu Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang berisikan pemikiran strategis serta arah kebijakan makro dan langkah-langkah penting berkaitan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas penanaman modal ke depan (*white paper*).

RUPM diharapkan akan menjadi dokumen perencanaan jangka panjang (15 tahun) yang komplementer terhadap perencanaan sektor dan menjadi referensi bagi perencanaan penanaman modal pusat dan daerah serta dunia usaha. Berfokus pada pangan, energi dan infrastruktur, implementasi RUPM dilakukan secara paralel mulai dari strategi jangka pendek seperti *quick wins (low hanging fruits)*, akselerasi pembangunan infrastruktur dan energi, industrialisasi skala besar menuju strategi jangka panjang, yaitu ekonomi berbasis pengetahuan.

Perumusan RUPM telah melalui proses pembahasan dengan *stakeholders* (interdep, dunia usaha, akademisi).

Keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran strategis BKPM dalam tahun 2010 dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

1. Realisasi Investasi PMDN/PMA Meningkat

- a. Realisasi investasi PMDN/PMA yang berhasil dicapai seluruhnya sebesar Rp. 208,5 triliun, yang terdiri dari realisasi investasi PMDN sebesar Rp 60,5 triliun dan realisasi investasi PMA sebesar Rp 148,0 triliun.
Dibandingkan dengan target realisasi investasi tahun 2010 yang ditetapkan dalam Renstra BKPM Tahun 2010-2014 sebesar Rp 160,1, terjadi peningkatan sebesar 30,2%. Sedangkan bila dibandingkan dengan capaian realisasi investasi tahun 2009 sebesar Rp 135,2 triliun, terjadi peningkatan sebesar 54,2%.
- b. Realisasi investasi di luar Pulau Jawa untuk tahun 2010 sebesar Rp 68,5 triliun, sedangkan realisasi yang sama untuk tahun 2009 sebesar Rp 25,0 triliun. Dengan demikian terjadi peningkatan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar 174%.

Penyebaran realisasi investasi di luar Pulau Jawa tahun 2010 mencapai 32,9% atau Rp 68,5 triliun dari total realisasi investasi, sedangkan penyebaran realisasi investasi di luar Pulau Jawa tahun 2009 hanya mencapai sebesar 18,5% atau 25,0 triliun dari total realisasi investasi sebesar Rp 135,2 triliun.

- c. Realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia selama tahun 2010 mencapai 463.012 orang yang terdiri dari proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak 133.053 orang, dan untuk proyek Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 329.959 orang. Apabila dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja Indonesia tahun 2009 sebanyak 303.537 orang, terdapat peningkatan sebesar 52,5%.
- d. Terdapat 56 proyek PMDN (32,8%) yang berorientasi ekspor dari 171 proyek PMDN yang telah menyelesaikan seluruh kegiatan investasinya, dan siap untuk berproduksi komersial. Sedangkan untuk proyek PMA terdapat 204 proyek (23,1%) yang berorientasi ekspor dari 883 proyek PMA yang telah menyelesaikan seluruh kegiatan investasinya, dan siap untuk berproduksi komersial.

2. SPIPISE Dimanfaatkan Secara Efektif dan Efisien Bagi Pelaksanaan PTSP

- a. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam pemberian pelayanan informasi dan perizinan investasi di pusat dan daerah telah dimanfaatkan bagi pelaksanaan PTSP oleh investor.
- b. Berfungsinya sistem **National Single Window on Investment (NSWi)** yang dibuka melalui portal BKPM telah dirasakan manfaatnya oleh investor dalam penyelesaian pelayanan perizinan investasi.
- c. Berfungsinya Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di 33 provinsi dan 40 kabupaten/kota sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2010, yang akan dikembangkan lebih lanjut dalam tahun-tahun berikutnya di kabupaten/kota diseluruh Indonesia.
- d. Memberikan penghargaan investasi kepada Daerah yang menyelenggarakan PTSP di Bidang Penanaman Modal terbaik, dan Perusahaan PMA/PMDN yang sudah ada, yang bertujuan untuk mendorong peningkatan iklim investasi di daerah.

3. Penetapan Daerah Unggulan Sebagai Daerah Potensial Pengembangan Investasi

Tahun 2010 BKPM telah menetapkan 7 Daerah Unggulan (*Regional Champions*) yaitu: Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Papua, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Riau.

Penetapan daerah unggulan tersebut berdasarkan : perekonomian daerah, proyek-proyek investasi yang ditawarkan, perangkat daerah untuk memberikan iklim investasi yang kondusif, ketersediaan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana.

Beberapa proyek penanaman modal yang potensial di daerah unggulan tersebut antara lain:

- a. Jalan Tol akses Balikpapan-Samarinda-Bontang di Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- c. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
- d. Peluang tambang emas, dan prospek sumber daya gas dan minyak bumi di Provinsi Papua.
- e. Bandar Udara Internasional Kertajati dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Tampomas di Provinsi Jawa Barat.
- f. Rel Kereta Api Terpadu dengan Pelabuhan (Tanjung Api-Api) di Provinsi Sumatera Selatan.
- g. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Provinsi Jawa Timur.
- h. Pembangunan Sistem Rel Kereta Api di Provinsi Riau.

4. Citra Indonesia Sebagai Tujuan Investasi Meningkat

BKPM telah melakukan komunikasi dengan para *Opinion Makers* serta Lembaga Pemikir (*Think Tank*) di negara-negara potensial antara lain Amerika Serikat, Inggris, dan Singapura dalam rangka memperbaiki citra Indonesia

sebagai negara tujuan investasi dengan menggunakan *tagline* “Invest in Remarkable Indonesia”. Sebagai hasilnya adalah membaiknya persepsi para investor asing di negara tersebut tentang kondisi Indonesia. Hal ini ditunjukkan berdasarkan survey yang dilakukan di negara tersebut terhadap para *executive global* dengan total penjualan lebih dari US\$ 2 Triliun, antara lain :

a. A.T Kearney Survey (USA).

Posisi Indonesia pada tahun 2009 menempati peringkat 21 dan pada tahun 2010 meningkat menjadi peringkat 20.

b. UK Trade and Investment.

Posisi Indonesia pada tahun 2009 menempati peringkat 6 dan pada tahun 2010 meningkat menjadi peringkat 2.

c. Moody's Investors Service.

Menaikan peringkat surat utang Indonesia dari Ba2 menjadi Ba1, atau satu peringkat di bawah *Investment Grade*. Kenaikan peringkat ini seharusnya sejak lama karena perekonomian Indonesia terus membaik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini digerakan oleh pasar domestik yang besar dan mampu dikelola oleh kebijakan ekonomi yang baik. Saat ini peringkat utang Indonesia Ba2 untuk mata uang lokal dan mata uang asing. Revisi prospek menjadi positif dilakukan Moody's selang tiga bulan setelah *Standard & Poor's* menaikan peringkat kredit Indonesia ke level tertingginya dalam dua belas bulan terakhir, yakni BB pada 12 Maret 2010.

5. Kerjasama Penanaman Modal Meningkat

BKPM telah ikut aktif dalam berbagai fora kerjasama di bidang ekonomi secara bilateral dengan beberapa negara mitra mencakup bidang perdagangan dan investasi, mengingat Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi di lingkungan ASEAN dan Asia Timur, sebagai berikut:

- a. BKPM atas nama Pemerintah telah menandatangani *Investment Support Agreement* (ISA) antara Indonesia dengan *Overseas Private Investment Corporation* (OPIC), sebuah lembaga asuransi investasi yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Kesepakatan ini sebagai wujud komitmen Pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi para investor yang menanamkan modalnya di Indonesia dan merupakan keinginan bersama untuk

mendorong kegiatan ekonomi di Indonesia guna meningkatkan pengembangan sumber daya ekonomi dan kapasitas produktif Republik Indonesia.

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat mengenai Persetujuan Dukungan Penanaman Modal terdiri dari 7 (tujuh) Pasal dan Pengaturan Pelaksanaan yang terdiri dari 6 (enam) butir.

- b. BKPM berpartisipasi aktif dalam perundingan World Trade Organization (WTO) yang mengkompromikan berbagai kepentingan yang bertentangan diantara negara anggotanya, khususnya dalam perumusan *Domestic Regulations* yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah pemegang otoritas di Indonesia untuk menerbitkan legislasi nasional (*The right to regulate*) yang diperlukan untuk mengamankan kepentingan nasional dan pembangunan.
- c. BKPM melakukan kerjasama dengan OECD dalam *Investment Policy Reviews* dalam rangka *Encouraging Responsible Business Conduct* yang penerbitan buku diluncurkan pada bulan Maret 2010.
- d. Finalisasi penyusunan *Reservation List Asia Comprehensive Investment Agreement (ACIA)*.

6. Peraturan di Bidang Penanaman Modal Meningkatkan Kepastian dan Keamanan Investasi

BKPM telah menyelesaikan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. BKPM juga telah melaksanakan koordinasi di tingkat Pusat dan Daerah, dengan mengikutsertakan kalangan dunia usaha, sebagai berikut:

- a. Penyelesaian Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Daftar Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
- b. Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang

merupakan perubahan dari Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009.

- c. Kepala BKPM mendapatkan pendelegasian wewenang penerbitan perizinan di bidang penanaman modal dari 14 Kementerian
- d. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian dalam rangka mendorong investasi pada kegiatan industri hulu dan pionir dengan memberikan insentif *tax holiday*.
- e. Telah ditandatangani Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 570/3727A/SJ; Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010; Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah.

7. Kegiatan Investasi Skala Besar yang Merupakan Prioritas Berdampak Besar Bagi Perekonomian Nasional

- a. Pengembangan proyek investasi di bidang *coal to liquid* yang saat ini pada tahap peninjauan untuk kajian bersama antara Sasol South Africa dengan Pertamina dan PT. Bukit Asam, dengan perkiraan nilai investasi US\$ 5 miliar.
- b. Kegiatan investasi di bidang pengembangan rel kereta api khusus angkutan batubara terpadu *Coal Terminal*, pembangkit listrik dan rencana *Smelter Alumina* di Kutai Timur, Kalimantan Timur oleh MEC Group dengan perkiraan nilai investasi US\$. 4 miliar.
- c. Telah diterbitkan persetujuan penanaman modal untuk kegiatan investasi kerja sama PT. Krakatau Steel dengan POSCO Korea Selatan (PT. Krakatau Posco) di bidang industri baja yang dengan rencana investasi awal US\$. 2,84 miliar.
- d. Kegiatan investasi di bidang oil & gas di Provinsi Kalimantan Timur, dengan rencana investasi awal sebesar US\$ 2,5 miliar.

Berkaitan dengan penetapan target realisasi investasi PMDN/PMA tahun 2011 sebesar Rp 240,0 triliun, meningkat 15% dari realisasi investasi tahun 2010, BKPM akan melakukan berbagai upaya agar target tersebut dapat dicapai, antara lain melalui penyempurnaan kebijakan penanaman modal, peningkatan pelayanan, dan pemberian berbagai fasilitas fiskal bagi penanaman modal, serta percepatan pembangunan infrastruktur.

Jakarta, 31 Januari 2011
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Kepala,



Gita Irawan Wirjawan

LAMPIRAN :
PENGUKURAN KINERJA SASARAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TAHUN 2010

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing	1. Jumlah daerah yang mempunyai perencanaan penanaman modal sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	33 Provinsi	33 Provinsi	100
		2. Jumlah daerah yang melaksanakan penanaman modal yang sesuai dengan RUPM	33 Provinsi	33 Provinsi	100
2.	Tersedianya rumusan kebijakan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan kebijakan penanaman modal yang diarahkan pada peningkatan daya saing	1. Jumlah peraturan /keputusan Kepala BKPM	3 Peraturan	3 Peraturan	100
		2. Jumlah usulan peraturan di bidang penanaman modal	5 Usulan Peraturan	5 Usulan Peraturan	100
		3. Presentase / jumlah daerah yang melaksanakan peraturan penanaman modal	33 Provinsi	33 Provinsi	100
3.	Meningkatnya citra Indonesia sebagai Negara tujuan penanaman modal yang prospektif dan kondusif	1. Peringkat Negara Indonesia dibidang penanaman modal	Peringkat 54 (WEF)	Peringkat 44 (WEF)	122,7
		2. Indeks kemudahan berusaha (<i>Ease of doing business</i>) RPJMN 2014	Peringkat 129 (IFC)/ World Bank	Peringkat 122 (IFC)/ World Bank	105,7
		3. Indeks daya saing	Peringkat 51 (IMD)	Peringkat 42 (IMD)	121,4
4.	Meningkatnya kerjasama penanaman modal	1. Jumlah MoU kerjasama Penanaman modal	2 MoU kerjasama Penanaman modal	2 MoU kerjasama Penanaman modal	100
		2. Jumlah kerjasama penanaman modal	3 kesepakatan kerjasama	3 kesepakatan kerjasama	100



Indonesia Investment Coordinating Board

		3. Jumlah penjadohan (match making) UKM dengan PMA/PMDN	penanaman modal 20 UKM dengan PMA 20 UKM dengan PMDN	penanaman modal 20 UKM dengan PMA 20 UKM dengan PMDN	100
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing	1. Waktu pelayanan penanaman modal yang efektif dan efisien	1-7 hari	1-7 hari	100
		2. Jumlah permohonan penanaman modal yang disetujui/dapat diselesaikan	6.500 Permohonan	6.500 Permohonan	100
		3. Survey kepuasan pelayanan masyarakat	Meningkat	Meningkat	100
6.	Meningkatnya realisasi dan diversifikasi penanaman modal	1. Realisasi penanaman modal	Rp 160,1 trilyun	Rp 160,1 trilyun	100
		2. Rasio penanaman modal jawa terhadap luar jawa	Meningkat	48,9%	
		3. Rasio penanaman modal primer terhadap sekunder dan tersier	Meningkat	23,8%	
		4. Rasio penanaman modal PMA terhadap PMDN	Meningkat	246%	
7.	Meningkatnya kualitas program/kegiatan dan anggaran serta evaluasi program/kegiatan BKPM	1. Opini BPK	WTP	WTP	100
		2. Presentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan	100%	100%	100
	Meningkatnya sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan	1. Sarana SPIPISE diseluruh Indonesia	144 unit	144 unit	100
		2. Jumlah kabupaten yang telah dilengkapi dengan sarana SPIPISE	33 Propinsi 50 Kab/Kota	33 Propinsi 50 Kab/Kota	100

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2010 : Rp 428.662.735.000,0

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2010 : Rp 378.271.371.900,0